

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan Indonesia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antarpihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangannya. Usaha yang dilakukan oleh bank pada hakikatnya berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu setiap bank perlu untuk tetap menjaga kesehatan usahanya dengan memelihara dan mempertahankan kepercayaan tersebut.

Kinerja dan kemampuan bank dalam mengelola resiko, profesionalisme, dan integritas pengurus bank, serta transparansi publik akan membentuk kepercayaan dari masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan nasabah, penerapan regulasi ketat dan *good corporate governance* pada industri perbankan merupakan prasyarat utama terwujudnya sistem perbankan yang sehat, wajar (*fairness*), transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), dan bertanggung jawab (*responsible*), serta mampu mendukung tercapainya kestabilan sistem keuangan Indonesia. (Yuhassarie oleh Arif Firmansyah, 2010: 82).

Menurut Pratolo (2007: 3) baik buruknya *good corporate governance* suatu perusahaan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern

padaperusahaantersebut. Dari kelimakomponenpengendalian intern, komponen*control environment* ataulingkunganpengendalian, merupakanpondasidari

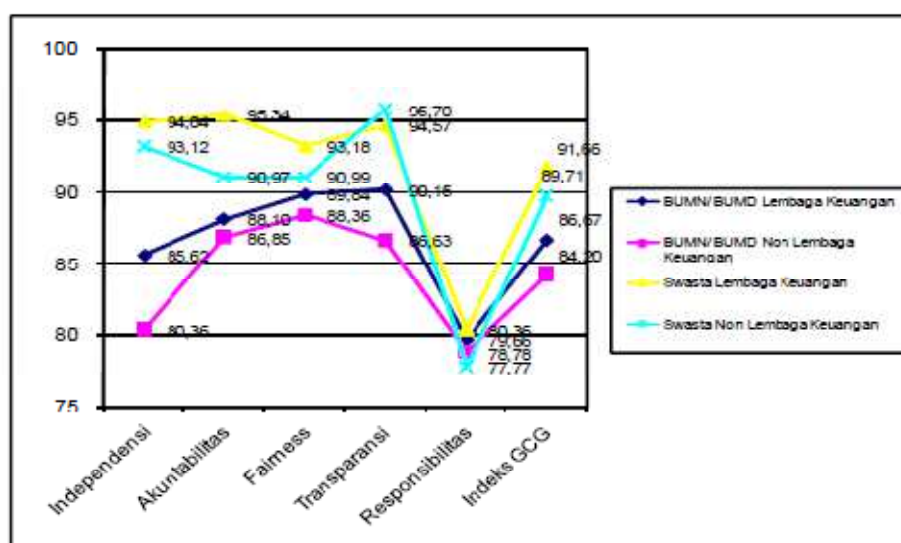


komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi. Kondisi ini sebagian besar ditentukan oleh pimpinan organisasi, dimana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Pengawas, filosofimanajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia (Arens, 2010:294-296). Karena sangat mendasar nya komponen lingkungan pengendalian sebagai aspek pengendalian intern, jenis perusahaan merupakan salah satu aspek lingkungan pengendalian yang dapat memiliki keterkaitan dengan *good corporate governance*.

Pelaksanaan *good corporate governance* di bank umum secara umum belum mengalami perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data BI, per Desember 2009 bank umum yang GCG-nya tidak baik bertambah 0,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, bank umum yang kriteria GCG-nya baik turun 7,2%. Sedangkan untuk kategori GCG yang sangat baik ternyata naik 0,1%. Demikian juga dengan bank umum yang kategori GCG-nya cukup baik, persentasenya naik 8,6% per Desember 2009. Selain itu, terjadi pengurangan jumlah bank umum yang GCG-nya kurang baik, yaitu sebesar 1,6%. Evaluasi atas otoritas perbankan tersebut pada dasarnya berdasarkan laporan bank umum itu sendiri kepada BI melalui mekanisme *self-assessment*, sesuai dengan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* Bagi Bank Umum. Sumber: Info Bank no: 386 Mei 2010 Vol. XXXIII

Data lain yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2009 tentang implementasi GCG di sektor swasta, BUMN dan BUMD, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Grafik Perbandingan Indeks Implementasi GCG Berdasarkan Kelompok Perusahaan Responden



Sumber: <http://kpk.go.id/> (27 Juni 2011)

Dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa rata-rata untuk implementasi prinsip-prinsip GCG (Independensi, Akuntabilitas, Fairness, Transparansi, dan Responsibilitas) pada BUMN dan BUMD Lembaga Keuangan masih di bawah sektor swasta baik untuk lembaga keuangan maupun non lembaga keuangannya.

Pemicu utama berkembangnya kebutuhan akan praktik-praktik *Good*

Corporate Governance (GCG) sebagai akibat terjadinya kebangkrutan perusahaan besar, yang diindikasikan sebagai akibat belum menerapkan Prinsip-prinsip GCG,

disampingbanyaknyapraktikKorupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN). (Emirzon, 2006; 93).Olehkarenaituimplementasiakuntabilitasharusterusmenerusdiupayakan, gunamenghindaripraktek-praktekpenyimpangan intern (fraud), penyalahgunaanwewenangdanperbuatanmelawanhukum yang mengarahpadaperbuatan KKN.

Arens (2010: 337) menyatakan bahwa munculnya penyimpangan intern disebabkan oleh tiga kondisi, yaitu pertamatekanan/insentif, yaitukeadaandimanaseorangkaryawanaatasatu unit fungsimendapattekananuntukmencapaisuatkondisi(*goals*)tertentudarimanajemen yang lebih tinggi, keduaadanya kesempatan, dan ketigaadalah sikap/rasionalisasi, yang berhubungan dengan sejumlah nilai etika, oleh *top-management*. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan, pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain.

Penciptaanlingkunganpengendalianharusdiupayakansedemikianrupakarena dengansemakinbaiknyakomponentersebutmakaakanmemberikandampak yang baikbagikomponenpengendalian intern yang lainnya. Sementaraupayalainnyaadalahmemperluaskewenangandalamtanggungjawabpembuatankebijakan anti-penyimpangan internal di level pimpinaninstitusi, termasuklangkah-langkahpencegahan(*prevention*) danpendeteksian(*detection*) penyimpangan internal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Jabar Banten (BJB) periode 2009 s.d. 2010, penyimpangan internal pegawai tetap dan tidak tetap

(*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penyimpangan Intern

Perusahaan	Jumlah Kasus			
	Penyimpangan Intern		Perkara Hukum	
	2009	2010	2009	2010
Bank Rakyat Indonesia	73	108	7	1634
Bank Jabar Banten	5	*	55	13
Bank Negara Indonesia	6	8	*	1

Sumber: Laporan Tahunan BRI, BNI, dan BJB Periode 2009-2010

*data tidak tersedia

Penyimpangan tersebut akan mempengaruhi tujuan pengendalian intern yaitu tujuan kepatuhan, yang menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Tantangan yang dihadapi perbankan dan sektor keuangan semakin berat dan kompleks. Perkembangan transaksi perantara informasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang semakin baik atas produk/jasa sektor keuangan membuat masyarakat menjadi lebih cerdas

as dan kritis sehingga tingkat toleransi terhadap suatu kesalahan menjadi sangat rendah bahkan cenderung mengharuskan hilangnya masa sekali (*Keynote Speech* Deputy Gubernur BI, 2011).

Untuk menghadapi permasalahan tersebut perusahaan di dunia perbankan diharuskan untuk meningkatkan kesadaran untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Governance* secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu cara atau metode bagaimana membuat alokasi sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa *outcome Governance* sebuah organisasi dapat dikatakan memberikan nilai tambah yang berarti apabila organisasi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja, konflik kepentingan berhasil di tekan pada level yang minimal, dan harmonisasi para pengambil keputusan berjalan dengan baik serta sumber daya organisasi dialokasikan secara efisien dan efektif. *Outcome Governance* diatas dapat dicapai apabila proses *Governancenya* memiliki pencapaian ukuran parameter yang kompetitif, yaitu: kompetensi, keselarasan, komitmen, dan biaya (4C: competence, congruence, commitment, and cost). Disamping ukuran parameternya, praktek-praktek *Governance* harus selalu berlandaskan jiwa transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan berkeadilan serta memiliki struktur dan mekanisme *Governance* yang handal. (Ahmad Syakhroza, 2007: disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal)

Berdasarkan teori organisasi, *Governance* akan berjalan sesuai dengan target yang diinginkan apabila instrumen-instrumen *Governance* proses terus

ditumbuhkembangkan sesuai dengan dinamika lingkungan demi mencapai tujuan yang diinginkan (Ahmad Syakhroza, 2007). **Pertama**, penerapan peraturan perlu terus diperkuat agar pemakaian sumber daya bisa secara terus menerus dikelola secara efisien dan efektif, lingkungan organisasi bisa dikendalikan dan terkendali untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu tujuan organisasi harus ditentukan terlebih dahulu sehingga adanya kesamaan persepsi terhadap tujuan bersama para pihak yang berkepentingan, alokasi sumber daya organisasi memiliki arah yang jelas sehingga efisiensi dan efektifitas dapat terukur dan terkendali.

Kedua, dalam sebuah organisasi apakah sebuah organisasi publik ataupun privat harus ada pemisahan fungsi yang tegas antara wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara pihak yang menjalankan dengan pihak yang mengawasi (Ahmad Syakhroza, 2007). Fungsi kedua pihak ini harus selalu terjaga secara seimbang dan kuat serta efektif. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya organisasi berjalan secara sehat. **Ketiga**, dalam sebuah organisasi akan selalu ada beraneka sikap, tingkah laku, dan kepentingan individual atau kelompok dimana seringkali berbagai tujuan ini tidak konsisten dengan tujuan bersama organisasi. Sehingga seringkali dari perbedaan ini banyak menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu, pengembangan praktek-praktek *Corporate Governance* akan banyak menghadapi kendala dan tantangan sehingga sistem dan prosedur, peraturan, dan kebijakan organisasi yang ada harus selalu disesuaikan dan disempurnakan agar sesuai dengan kondisi organisasi. Dengan kata lain, *Governance* itu bersifat dinamis, responsif, dan adaptif. Perangkat

kebijakan *Governance* yang dikembangkan harus bisa mengadopsi berbagai kepentingan tersebut dengan tetap mengedepankan tujuan organisasi.

Rendahnya kesadaran akan hal *Good Corporate Governance* tersebut menjadi akar dari berbagai masalah dalam *Corporate Governance*, dan yang paling menghawatirkan adalah masalah fraud. Dengan kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* maka akan sulit untuk mewujudkan *clean government*.

Perubahan menuju *clean Governance* membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai elemen, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Perhatian lebih harus diberikan pada peningkatan fungsi pemeriksaan intern di dalam *Corporate Governance*. Hal ini sejalan dengan dengan tiga kepentingan manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektifitas operasional, dan ketaatan kepada hukum dan peraturan. Pengendalian intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini mulai dari top-manajemen hingga karyawan yang terlibat dalam operasional perusahaan tidak luput dari perannya sebagai agen dari pengenalan intern tersebut.

Manajemen suatu organisasi berkewajiban untuk mewujudkan GCG dalam melaksanakan kegiatan manajerial dan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, manajemen perlu memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, kemandirian, dan kesadaran akan tanggungjawab sosial. Upaya untuk mewujudkan GCG sangat ditentukan oleh sistem pengendalian intern perusahaan. (Hiro Tugiman, 2005:22)

Mengingat penerapan pengendalian internal merupakan suatu tindakan atas keputusan manajemen yang sangat penting dan berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Corporate Governace* seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap dua aspek tersebut, dimana diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap *Good Corporate Governance*.

Review penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan oleh peneliti, yang berhubungan atau berkaitan dengan pengaruh pengendalian intern terhadap *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Matriks Penelitian Terdahulu

NamaPeneliti (Tahun)	JudulPenelitian	ObjekPenelitian	HasilPenelitian	Perbedaan	Persamaan
1. An Nissa Surya Sumunar (2004)	PengaruhPengendalian Intern TerhadapPenerapanPrinsip-Prinsip GCG	31 Perusahaan Go Public di Indonesia.	Hasilpenelitianinimenunjuk anbahwaPengendalian intern berpengaruhterhadappenerapanprinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	1. Penelitian terdahulu menjadikan perusahaan dari berberapa unit bisnis yang berbeda sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian ini menjadikan lembaga keuangan (Bank) sebagai objeknya. Hal ini telah sesuai dengan saran yang diberikan oleh peneliti terdahulu, untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. 2. Peneliti terdahulu menggunakan alat analisis statistik non-parametrik, dan menggunakan Spearman Rank sebagai alat uji Asosiatifnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan statistik parametrik.	Menggunakan variabel dependen dan independen yang sama.
2. Suryo Pratolo (2007)	<i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit ManajemendanPengendalian Intern Sebagai VariabelEksogensertaTinjauannyapadaJenis Perusahaan	BUMN di Indonesia	Hasilpenelitianinimenunjuk anbahwaPengendalian intern berpengaruhterhadappenerapanprinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dankinerjaperusahaanbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.	1. Penelitian terdahulu menjadikan perusahaan dari berberapa unit bisnis yang berbeda sebagai objek penelitian. 2. Peneliti terdahulu menggunakan dua variabel independen (Audit Manajemen dan Pengendalian Intern).	Menjadikan GCG sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern yang baik berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

dan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan pengendalian intern dipandang sangat penting terhadap terciptanya *good corporate governance*. Selain itu fenomena yang diangkat membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Studi Pada Kantor Cabang Tiga Bank Pemerintah di Kota Bandung)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengendalian intern pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank BJB?
2. Bagaimana *good Corporate Governance* pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank BJB?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap *Good Corporate Governance*?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang pengaruh pelaksanaan pengendalian intern terhadap perwujudan *Good Corporate Governance*. Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank BJB.
2. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank BJB.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance* pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank BJB.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta sudut pandang mengenai peran pengendalian intern pada perusahaan serta pengaruhnya terhadap *Good Corporate Governance*. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan maupun literatur dan referensi bagi karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya. Serta penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai contoh studi kasus nyata dalam perkuliahan di samping digunakan sebagai koleksi hasil penelitian di perpustakaan.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap manajemen perusahaan atas pentingnya peran pelaksanaan pengendalian intern terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.